
**MENGHADIRKAN KESETARAAN DI RANAH DOMESTIK : SEBUAH KAJIAN
MENUJU PENGINTEGRASIAN KEBIJAKAN PRO KESETARAAN GENDER**

Agus Pratiwi

Puslitbang Gender dan Anak Universitas Padjadjaran, Bandung
Email: puslitbangga@unpad.ac.id

ABSTRAK. Program-program Pengarusutamaan Gender (PUG) di Jawa Barat sudah dirumuskan dalam seperangkat kebijakan. Sayangnya, program-program PUG hanya berfokus pada peringkat *Gender Development Index* (GDI) dan *Gender Empowerment Measurement* (GEM), yang umumnya dilandaskan pada tingkat partisipasi perempuan di ranah publik, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan GDI/GEM. Hambatan utama bagi para perempuan untuk dapat berpartisipasi di ranah publik adalah kegagalan bernegosiasi dengan pasangan/suami dalam pembagian tanggung jawab kerumahtanggaan yang seimbang. Untuk itu, penelitian ditujukan untuk memaparkan pentingnya PUG di ranah domestik dalam pembangunan kesetaraan gender di Jawa Barat melalui verifikasi terhadap faktor keberhasilan dan kegagalan GDI/GEM. Hasil verifikasi dirumuskan menjadi model PUG di ranah domestik, yang memungkinkan perempuan dapat berpartisipasi di ranah publik. Implementasi model tersebut disesuaikan dengan potensi-potensi SDM dan lembaga-lembaga yang ada di Jawa Barat. Penelitian dilakukan melalui organik feminist inquiry, di mana identifikasi masalah merupakan kesepakatan antara peneliti dan kolaborator penelitian. Oleh karena itu, penelitian diharapkan menghasilkan kontribusi yang tepat sasaran dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Kebutuhan akan PUG di ranah domestik memang perlu tidak hanya untuk diprogramkan, tetapi juga untuk difasilitasi oleh pemerintah Jawa Barat agar aksesibel bagi masyarakat. Untuk menjalankan program dan fasilitas tersebut, pemerintah Jawa Barat dapat melibatkan potensial-potensial, yaitu kader-kader yang memiliki komitmen untuk PUG, seperti kader serikat buruh dan kader Posyandu.

Kata kunci: PUG, domestik, kesetaraan gender

**BRINGING IN THE REALM DOMESTIC EQUITY: AN ASSESSMENT OF POLICY
TOWARDS INTEGRATING PRO GENDER EQUALITY**

ABSTRACT. *Gender mainstreaming programmes have been enacted by the government of West Java. Unfortunately, these programmes focus only on the competition of GDI and GEM rank, which is generally based on the female participation in public domain, without considering the decisive factors enabling both*

accomplishment and failure of the GDI/GEM. The main obstacle for women to be able to participate in the public domain is their failure to negotiate with partner/husband in overcoming the sexual division of labour in their household. Therefore, the study aims to unveil the urgency of gender mainstreaming in the domestic domain within the gender equality development in West Java through the verification towards the factors of accomplishment and failure in materializing GDI/GEM. The verification is formulated into a model of gender mainstreaming in the domestic domain, which enables women to participate in decision maker position, higher education, and political activities. The implementation of this model is adapted to the prevailing potentials in West Java. The study is conducted through the organic feminist inquiry, in which the problem identification constitutes an agreement between the researcher and the research collaborators. Thus, the study is expected to result in contributions which are needed by the people of West Java. The need for gender mainstreaming in the domestic domain is necessary not only in form of programmes, but also in the form of accessible facilities provided by the West Java government. Running the programmes and facilities, the West Java government should embrace the potentials, i.e. the cadres who are committed to the gender mainstreaming, such as trade union cadres and Posyandu cadres.

Keywords: gender mainstreaming, domestic, gender equality

PENDAHULUAN

Partisipasi perempuan Indonesia di sektor publik cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut setidaknya dapat dilihat dari angka partisipasi perempuan dalam kerja di ranah publik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa angka pekerja perempuan mengalami kenaikan rata-rata 1 juta orang per tahun sejak 2006. Bahkan, dari tahun 2009 ke tahun 2010, jumlah pekerja perempuan meningkat sebanyak lebih dari dua juta orang (BPS: 2006, 2007, 2008, 2010).

Angka tersebut tidak berarti bahwa negosiasi antara laki-laki dan perempuan di ranah domestik dalam hal pembagian peran yang setara berjalan dengan baik. Bergantung pada tenaga pekerja rumah tangga (PRT) merupakan sebagian besar jalan pintas yang diambil oleh para perempuan, khususnya perempuan kelas menengah di perkotaan, untuk dapat bekerja di ranah publik. Bagi perempuan dengan pendapatan rendah, dan karenanya tidak mampu mempekerjakan PRT, membatasi aktivitas di ranah public, khususnya dalam hal politik, menjadi pilihan.

Kebijakan terkait kesetaraan gender, dapat dikatakan bahwa agenda pengarusutamaan gender (PUG) terfokus pada program kesetaraan gender di ranah publik, baik di lapangan pekerjaan maupun di parlemen. Asumsi bahwa program PUG yang berfokus pada partisipasi perempuan di ranah publik akan dengan sendirinya mempengaruhi dengan kesetaraan gender di ranah domestik tampaknya tidak dapat